

# ACTA CIVICUS

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan

## DAFTAR ISI

Editorial.....	i
<b>Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional</b> Udin S. Winataputra.....	1 - 10
<b>Pendidikan Demokrasi sebagai Konteks <i>Civic Education</i> di Negara Berkembang</b> Dasim Budimansyah.....	11 - 26
<b>Indonesia's Citizenship Education: Shifting Paradigm in Transition to Democracy</b> Fredyy K. Kalidjernih.....	27 - 44
<b>Perpaduan dalam Kurikulum Sivik dan Kewarganegaraan</b> Amir Hasan Dawi, Mohmad Noor Mohmad Taib, Abu Bakar Yusuf.....	45 - 54
<b><i>Civic Education</i> Berbasis Pendidikan Moral di Cina</b> Samsuri.....	55 - 66
<b>Profil <i>Civic Education</i> di Pakistan</b> Deny Setiawan.....	67 - 76
<b>Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang</b> Dikdik Baehaqi Arif.....	77 - 84
<b>Tinjauan Buku:</b> <b>Survei Awal Kepustakaan: PERBANDINGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA:</b> John J. Cogan, Paul Morris dan Murray Print (eds.), <i>Civic Education in the Asia-Pacific Region: Case Studies Across Six Societies</i> , (New York: Routledge Falmer, 201 pp) ISBN: 0-415-93213-0.	

## CIVIC EDUCATION BERBASIS PENDIDIKAN MORAL DI CINA\*

Oleh : Samsuri \*\*

### Abstract

This paper describes shortly the profile of civic education in the People Republic of China (PRC). Civic education (CE) in educational system of PRC has characteristics as moral education or political education or ideological education. CE explained as moral education as well as ideological-political education which implemented at all school levels. Development of CE in PRC, historically, has been influenced by political system at country, especially the Communist Party of China (CPC) since 1949. Entering the globalization era, CE within Moral Education subject gradually has changed toward citizenship education according to Kerr (1999) categorized.

**Keywords :** pendidikan moral, pendidikan kewarganegaraan, ideologi, situs kewarganegaraan, perbandingan.

### Pendahuluan

Tidak ada sebutan khusus "pendidikan kewarganegaraan" (*civic education*) di Republik Rakyat Cina (RRC, selanjutnya disebut Cina). Pendidikan kewarganegaraan khas Cina terletak secara melekat (*inherent*) dalam bentuk pendidikan moral. Pendidikan moral ini selalu berkaitan erat dengan kehidupan politik di Cina. Dalam amatan Wing On Lee dan Chi Hang Ho (2005: 413) serta Limin Bai (1998: 525), istilah "pendidikan moral" (*daode jiaoyu*) disebut juga dengan istilah pendidikan

\*Bagian besar naskah ini semula oleh penulis disajikan sebagai paper untuk kajian Perbandingan Civic Education di Negara Berkembang Semester Genap 2006/2007 di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, kemudian dimuat dan dijadikan sebagai salah satu bagian materi Bab 3 dari buku Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah, *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*, (Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2007). Untuk keperluan jurnal ini, naskah disunting ulang seperlunya oleh penulis. Terimakasih disampaikan kepada penyunting ahli, terutama kepada Profesor Udin S. Winataputra dan Dr. Dasim Budimansyah, serta Gini Pratigina atas komentar-komentar terhadap draft naskah ini.

\*\*Samsuri, lektor di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE) Universitas Negeri Yogyakarta. Bidang Keahliannya ialah Etika dan Pendidikan Moral, dengan minat utama kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Alamat e-mail: <samsuri@uny.ac.id>

ideologi (*sixiang jiaoyu*) atau pendidikan politik (*zhengzhi jiaoyu*) atau pendidikan ideopolitik, sehingga kualitas moral bagai dua sisi mata uang yaitu sama kualitasnya dengan kualitas ideomoral dan atau moral-ideopolitik (*sixiang zhengzhi suzhi*). Tiga istilah tersebut digunakan secara bertukaran dalam literatur pendidikan di Cina.

Secara etimologis, pendidikan moral di Cina menjadi sesuatu yang esensial sebagai alat sosialisasi politik, dalam mentransmisikan nilai-nilai ideologi dan politik, tidak hanya kepada para siswa, tetapi juga untuk masyarakat luas (Lee dan Ho, 2005: 413). Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Cina (1988), *Notice on Reforming and Strengthening the Moral Education Work in Secondary and Primary Schools*, dinyatakan bahwa "moral education is ideological and political education. It plays an important role in upholding the socialist nature of the school" (sebagaimana dikutip Lee dan Ho, 2005: 414). Dari dokumen tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan moral merupakan pendidikan ideologi dan politik secara bersamaan. Dengan demikian, perubahan politik sekaligus mempengaruhi perkembangan pendidikan politik di Cina. Hal serupa juga berarti bahwa pendidikan moral mencerminkan perubahan politik (Lee dan Ho, 2005: 414).

Dalam tulisan ini, kajian pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di Cina akan memfokuskan diri kepada konteks pendidikan moral sebagai bentuk lain *civic education* di Cina. Selanjutnya, pembahasan akan mencakup kajian tentang landasan pengembangan pendidikan moral sebagai *civic education*, kurikulum dan bahan ajar pendidikan moral sebagai *civic education*, dan kultur kelas pendidikan moral sebagai *civic education* dan situs kewarganegaraan di Cina.

### Konteks Pendidikan Moral sebagai *Civic Education* Model Cina

Penjelasan Wing On Lee (2006:5) tentang karakteristik pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia dapat membantu pemahaman kita terhadap keberadaan pendidikan moral yang menjadi aspek pokok kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Cina. Sebagaimana dinyatakan oleh Kennedy dan Fairbothor (2004), (dalam Lee, 2006: 5) bahwa pendidikan kewarganegaraan Asia ditandai oleh konsepsi-konsepsi keutamaan moral dan nilai-nilai personal.

Dalam kasus Cina, sebagaimana telah dipaparkan di muka, pendidikan kewarganegaraan merupakan kombinasi dari "civic education, moral education, political education and ideological education" (Lee, 2006: 5). Meskipun istilah-istilah itu dapat dibedakan, namun secara konseptual sering saling dipertukarkan dalam

penerapannya. Lee dan Zhong (dalam Lee, 2006 : 5) telah mengidentifikasi suatu kontinum antara orientasi secara politik *civic education* dan orientasi secara politik pendidikan moral dalam perkembangan kurikulum kewarganegaraan di Cina lebih dari 50 tahun yang lampau. Pendidikan kewarganegaraan di Cina setara (ekuivalen) dengan pendidikan ideologis dan politik pada tahun-tahun awal Pemerintahan Komunis Cina. Fokus pendidikan kewarganegaraan meningkatkan orientasinya kepada kualitas moral personal pada saat sekarang, meskipun elemen-elemen politik selalu hadir dalam sejarah pendidikan kewarganegaraan Cina. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral adalah suatu kontinum di Cina, di mana pada periode awal lebih pada pendidikan kewarganegaraan tetapi pada saat sekarang lebih kepada pendidikan moral, dan tidak ada waktu tanpa satu dengan lainnya (Lee, 2006: 5).

Dalam sistem pendidikan nasional Cina ada konsep *deyu*, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, *deyu* memiliki pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. Arti ini lebih luas dikenal sebagai "makro-*deyu*". Mikro-*deyu* berarti hanya pendidikan moral; sedangkan yang lainnya termasuk makro-*deyu* (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 449-450).

Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di Cina secara ringkas dapat dilihat kontinum perkembangannya sejak 1949 hingga sejak 1993. Pada periode 1949-1978, pendidikan moral berorientasi politik, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri kepada *Common Framework for Chinese People's Political Negotiations* dari Partai Komunis Cina. Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, mencintai buruh, mencintai ilmu, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam Lee dan Ho, 2005: 419).

Pada periode 1978-1993, secara gradual pendidikan moral menjadi independen dari politik. Pada Pleno Ketiga dari Kongres Nasional Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen "Behavioral Code for Primary and Secondary Students" (PRCMOE, 1979). Dari dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disiplin siswa; afektivitas terhadap tanah air sosialis dan kewirausahaan sosialis; dedikasi terhadap pembangunan negara; haus ilmu pengetahuan baru; dan kemauan untuk berpikir dan

penerapannya. Lee dan Zhong (dalam Lee, 2006 : 5) telah mengidentifikasi suatu kontinum antara orientasi secara politik *civic education* dan orientasi secara politik pendidikan moral dalam perkembangan kurikulum kewarganegaraan di Cina lebih dari 50 tahun yang lampau. Pendidikan kewarganegaraan di Cina setara (ekuivalen) dengan pendidikan ideologis dan politik pada tahun-tahun awal Pemerintahan Komunis Cina. Fokus pendidikan kewarganegaraan meningkat orientasinya kepada kualitas moral personal pada saat sekarang, meskipun elemen-elemen politik selalu hadir dalam sejarah pendidikan kewarganegaraan Cina. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral adalah suatu kontinum di Cina, di mana pada periode awal lebih pada pendidikan kewarganegaraan tetapi pada saat sekarang lebih kepada pendidikan moral, dan tidak ada waktu tanpa satu dengan lainnya (Lee, 2006: 5).

Dalam sistem pendidikan nasional Cina ada konsep *deyu*, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, *deyu* memiliki pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. Arti ini lebih luas dikenal sebagai "makro-*deyu*". Mikro-*deyu* berarti hanya pendidikan moral; sedangkan yang lainnya termasuk makro-*deyu* (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 449-450).

Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di Cina secara ringkas dapat dilihat kontinum perkembangannya sejak 1949 hingga sejak 1993. Pada periode 1949-1978, pendidikan moral berorientasi politik, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri kepada *Common Framework for Chinese People's Political Negotiations* dari Partai Komunis Cina. Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, mencintai buruh, mencintai ilmu, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam Lee dan Ho, 2005: 419).

Pada periode 1978-1993, secara gradual pendidikan moral menjadi independen dari politik. Pada Pleno Ketiga dari Kongres Nasional Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen "Behavioral Code for Primary and Secondary Students" (PRCMOE, 1979). Dari dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disiplin siswa; afektivitas terhadap tanah air sosialis dan kewirausahaan sosialis; dedikasi terhadap pembangunan negara; haus ilmu pengetahuan baru; dan kemauan untuk berpikir dan

keberanian untuk kreatif. Pada 1988, terdapat sebuah revisi radikal dalam kurikulum pendidikan politik. Di tingkat sekolah menengah pertama, mata pelajaran 'Civics' (Ilmu Kewarganegaraan) diperkenalkan di kelas 1 SMP (usia 12), 'sejarah sosial' (social history) di kelas 2 SMP (usia 13), dan 'Konstruksi Sosialisme Cina' (construction of Chinese socialism) di kelas 3 SMP (usia 14). Di tingkat sekolah menengah atas dikenalkan 'Pandangan Ilmiah Kehidupan' (scientific view of life) untuk kelas 1 SMA (usia 15), 'Ekonomi' (economics untuk kelas 2 SMA (usia 16), dan 'Politik' (politics) di kelas 3 SMA. Pada 1988 pun dilahirkan satu dokumen lainnya, yaitu *Outline of Moral Education Secondary School* yang diterapkan secara penuh pada 1991. Arti penting dokumen ini ialah bahwa pendidikan moral tidak lagi diembel-embeli dengan kata 'ideologi'. Pendidikan moral mulai memfokuskan diri kepada kurikulum kewarganegaraan semata. Dokumen *Outline* itu mewajibkan pengajaran materi dan pendekatannya kepada aspek-aspek nilai, sikap dan perilaku (Lee dan Ho, 2005: 419-420). Fokus utama *Outline* mencakup kajian: Sosialisme dan kolektivisme berdasarkan atas patriotisme; Standar moral dan perilaku siswa; dan Adopsi sebuah pendekatan motivasional untuk mengembangkan kepercayaan diri (*self-esteem*), kemandirian (*self-reliance*), dan kekuatan diri siswa (Lee dan Ho, 2005: 420).

Pada 1993 dan 1994 Pemerintah Cina mengeluarkan dua dokumen penting yang merubah arah pendidikan moral. Dua dokumen itu ialah *Opinions on Strengthening and Improving the Party and Ideopolitical Works in Higher Institutes in New Circumstances* dan *Opinions on Further Strengthening and Improving Moral Education Work in Schools* (Lee dan Ho, 2005: 420). Dokumen itu meluncurkan gagasan pendidikan "dua pelajaran", yang berarti bahwa pendidikan politik didefinisikan sebagai satu kombinasi pelajaran teori Marxis dan pelajaran pendidikan ideopolitik. Perbedaan dua pelajaran itu di dalam pendidikan moral itu mengatur pemeliharaan pentingnya Marxisme dalam kurikulum sekolah, namun pada saat yang sama mencakup status resmi untuk pendidikan ideopolitik. Istilah 'pendidikan ideopolitik' lebih kepada 'penanaman kualitas ideomoral'. (Lee dan Ho, 2005: 420-421).

Pada periode sejak 1993 terjadi depolitisasi pendidikan moral, yakni ditandai dengan penerimaan kebijakan 'dua pelajaran' sebagai demarkasi untuk pendidikan moral. Ini merupakan tanda pengakuan status independen dari pendidikan moral oleh Pemerintah Cina. Sejak meluncurkan modernisasi, maka pengajaran moralitas kewarganegaraan berorientasi kepada ekonomi pasar (Lee dan Ho, 2005: 421). Hasil yang dicapai dari periode ini ialah bahwa modernisasi dan keterbukaan Cina terhadap ekonomi pasar (kapitalisme global) menjadikan kurikulum